



LAPORAN KINERJA **TRIWULAN I** **2025**

**DIREKTORAT
PENGOLAHAN**

**DIREKTORAT
JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING**

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 adalah Rancangan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu, Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 105,09% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 April 2025

Direktur Pengolahan



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si

Tim Penyusun

PENGARAH

Direktur Pengolahan

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Triwulan I Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 3 (tiga) **Sasaran Kegiatan (SK)** sebagai berikut: (1) Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; (2) Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 3 IKK bersifat tahunan, 5 IKK bersifat triwulan, 3 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI, Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP, Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan

Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Indikator yang bersifat semesteran adalah Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebelas (11) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I adalah sebesar 105,09 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang targetnya ada pada Triwulan I. Adapun rincian capaian periode triwulan I yaitu sebagai berikut :

- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 25%; capaian 25% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 3%; capaian 8% atau 120,00% dari target.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 10%; capaian 10% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 120,00% dari target.

Sehubungan dengan tindak lanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Pengolahan mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp 15.262.197.000,- dari pagu semula Rp 16.829.050.000,- menjadi Rp 1.566.853.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 249.578.600,- atau setara dengan 15,93% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang

Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama triwulan I Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama triwulan I Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan I Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Tim Penyusun	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama	4
1.6. Sistematika Penyajian	4
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III	10
AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan. 13	
IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	22
IK 3. Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	30
Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	38
IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	38
IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	45

IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah.....	49
IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	58
IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	60
IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	61
IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	62
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	64
BAB IV	66
PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Permasalahan	67
4.3. Permasalahan	68
4.4. Lampiran	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025.....	8
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025.....	11
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan.....	13
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI.....	23
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	30
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	38
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	46
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	50
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	59
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	60
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	61
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	63
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan.....	4
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 3. Sistematisa Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW I Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku	10
Gambar 5. Audiensi dengan UPI Pengalengan Banyuwangi.....	15
Gambar 6. Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pembinaan UPRL	16
Gambar 7. Diskusi Pengembangan Biostimulan Rumput Laut.....	17
Gambar 8. Diskusi Hilirisasi Rumput Laut.....	18
Gambar 9. Pembinaan UPI Skala Mikro Melalui Kunjungan Lapangan	19
Gambar 10. Webinar Pengolahan Series #3 dengan tema “Kupas Tuntas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pada Produk Perikanan”	20
Gambar 11. Webinar Pengolahan Series #09 dengan tema “Kupas Tuntas Frozen Seafood: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan”	22
Gambar 12. Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI	25
Gambar 13. Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan	26
Gambar 14. <i>Refreshment</i> Konseptor dan Editor RSNI 2025	27
Gambar 15. Rapat RSNI1 Komtek 65-05 Produk Perikanan	29
Gambar 16. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan.....	32
Gambar 17. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh.....	33
Gambar 18. Koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	34
Gambar 19. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).....	35
Gambar 20. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).....	37
Gambar 21. Pertemuan Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025	40
Gambar 22. Rapat Finalisasi Perhitungan Volume Produk Olahan dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar	41
Gambar 23. Rapat Persiapan Sosialisasi Peluang Kerjasama Pemenuhan Pasokan Produk Perikanan Antara Unit Pengolahan Ikan dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).....	42
Gambar 24. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi UPI Nilai Tambah Kabupaten Tulungagung	44
Gambar 25. Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025.....	45
Gambar 26. Monitoring dan evaluasi (money) awal pemanfaatan <i>Chest Freezer</i> (CF) dan Peralatan Pengolahan	48
Gambar 27. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan.....	54

Gambar 28. Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa	55
Gambar 29. Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ...	56
Gambar 30. Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan di UPI Nilai Tambah Pekalongan	57
Gambar 31. Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 yang yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah. Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada

indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan 2025”.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMENKP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2024 berjumlah 70 orang dengan komposisi 49 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 8 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 32 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan II/c sebanyak 2 orang, II/d sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 5 orang, III/d sebanyak 13 orang, IV/a sebanyak 10 orang, IV/b sebanyak 5 orang, IV/c sebanyak 2 orang, IV/d sebanyak 1 orang, IV/e sebanyak 1 orang. Non golongan ada 21 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak

(*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

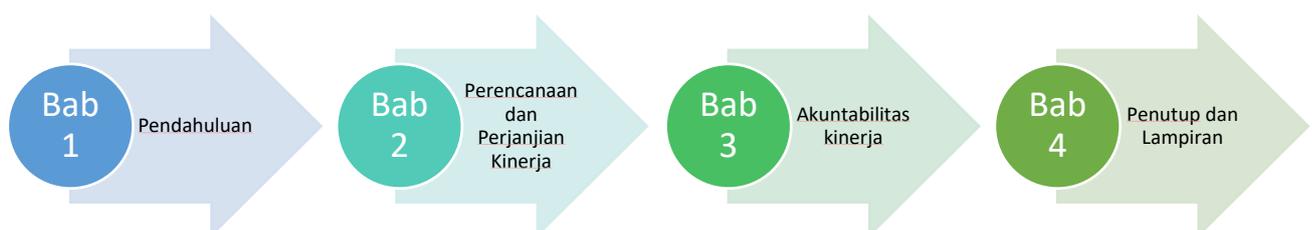
Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh

Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan I Tahun 2025. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2025 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rancangan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

3.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana

kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2025-2029. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 11 indikator kinerja yang terdiri dari 3 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, 5 indikator kinerja bersifat triwulanan. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Januari sampai dengan Maret 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada triwulan I sebesar 105,09. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2024 adanya kenaikan 2,1 poin atau 2,04%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 2,18 poin atau 2,12%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW I Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi		% Terhadap Target	
				Tahun 2025	TW I	Tahun 2025	TW I	Tahun 2025	TW I
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7					
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100	25		25		100%
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100	3		8		120%
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71					
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80					

		6.	Persentase Pelaku Usaha yang Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100	10		10		100%
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95	95		100		120%
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100					
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81					
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86					
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87					

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi produksi dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggang ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumutan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	-	68	-	68,7	-	68,26	-	-	-	-	-	-

IK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dilaporkan secara triwulanan yang dimulai pada triwulan II, sehingga pada triwulan I belum terdapat capaian. Hal tersebut sama dengan IK Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan pada tahun 2024, dimana pada triwulan I belum terdapat capaian. Adanya kenaikan jumlah target pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2024, pada tahun 2024 IK Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan memiliki

target sebesar 68% sedangkan pada tahun 2025 terdapat kenaikan 0,26 poin atau naik menjadi 68,26 %.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp25.131.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 2.869.900,- atau sebesar 11,42% dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan triwulan I adalah efisiensi anggaran menghambat pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan ke lapangan. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan triwulan I adalah telah dilaksanakan diskusi atau kegiatan pembinaan melalui daring. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu dikarenakan anggaran yang menjadi keterbatasan, maka diskusi atau pembinaan secara daring tetap perlu dilakukan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Audiensi dengan UPI Pengalengan Banyuwangi

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 di Banyuwangi. Dihadiri oleh perwakilan 11 UPI pengalengan/ *pre cooked loin* yaitu PT. Banyuwangi Cannery Indonesia, PT. Pasifik Masami Indonesia, CV. Pasific Harvest, PT. Blue Ocean Foods Indonesia, PT. Karya Manunggal Prima Sukses, PT. Lautindo Synergi Sejahtera, PT. Indojoya Pratama, PT. Sari Laut Jaya Food Products, PT. Avila Prima Intra Makmur, CV. Sinar Mas Mina Bahari, PT. Sumber Yala Samudera, dan 1 UPI pembekuan ikan yaitu CV. Restu Ibu. Turut hadir dalam pertemuan Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi, Kepala UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, serta perwakilan BPPMHKP Wilker Banyuwangi dan Satuan PSDKP Banyuwangi. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk. Saat ini, UPI menghadapi masalah yang menghambat kinerjanya, seperti kekurangan bahan baku. Untuk cakalang, kelangkaan mulai terjadi sejak Oktober 2024, dengan UPI hanya mampu memenuhi 10-20% dari kebutuhan. Pelaku usaha mengusulkan pembatasan ekspor untuk bahan baku tertentu. Ketersediaan lemuru

dipengaruhi oleh musim, sehingga regulasi importasi diharapkan dapat dipermudah. Diperlukan data akurat tentang kebutuhan dan produksi untuk mengetahui kekurangan yang ada. KKP akan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk memastikan kebutuhan UPI terpenuhi. Biaya melaut yang tinggi juga menjadi masalah, banyak kapal tidak beroperasi, mengurangi pasokan lemuru di Banyuwangi. UPI harus mendatangkan bahan baku dari luar daerah, sehingga disarankan adanya fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha. Prosedur pengajuan izin edar dari BPOM memakan waktu lebih dari lima bulan, dan perlu harmonisasi agar parameter uji izinnya sama dengan yang ada dalam Sertifikat Kelayakan Pengolahan. UPI juga didorong untuk memenuhi persyaratan EU approval number. Selain itu, terdapat pembelian bahan baku langsung oleh WNA yang mengurangi pasokan ke UPI. Diperlukan koordinasi untuk memprioritaskan produksi daerah untuk pelaku usaha dalam negeri. UPI juga harus mengelola lingkungan dan diimbau untuk mengalokasikan anggaran CSR bagi masyarakat sekitar. UPI perlu berinovasi dan berkomunikasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya.



Gambar 5. Audiensi dengan UPI Pengalengan Banyuwangi

2. Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pembinaan UPRL

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025, bertempat di PT. Buanatama Fajar Abadi (BFA), Karawang. PT. BFA mulai beroperasi pada tahun 2016, awalnya memproduksi ATCC, SRC, dan blended karagenan. Namun, sejak pandemi covid, perusahaan mengalami kesulitan memproses ATCC dan SRC, sehingga hanya memproduksi blended karagenan dengan kapasitas terpasang 1,5 ton per bulan. Dalam prosesnya, PT. BFA menggunakan ATCC dari UPRL lain yang

kemudian digiling menjadi SRC. Sertifikasi utama yang dibutuhkan oleh buyer meliputi fitosanitari, HACCP, halal, dan kosher. Isu yang dihadapi industri karagenan antara lain fluktuasi harga bahan baku, kompetitor dengan produk sejenis, dan kualitas yang tidak konsisten. Usulan hilirisasi meliputi validasi data, standar harga yang menguntungkan, pembatasan investasi asing, fokus produksi di daerah berkualitas, efisiensi logistik, dan promosi produk karagenan Indonesia.

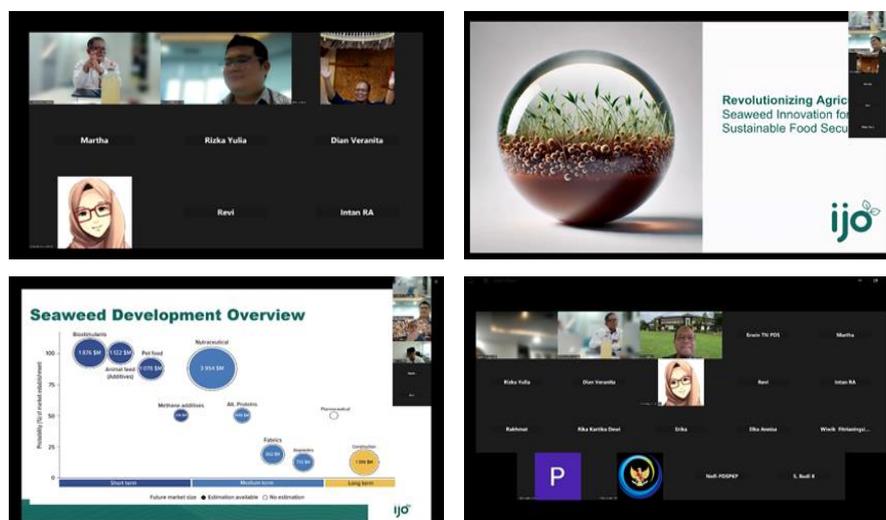


Gambar 6. Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pembinaan UPRL

3. Diskusi Pengembangan Biostimulan Rumput Laut

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di Ruang Rapat Direktur Pengolahan. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan beserta jajarannya, Ryan Dewangga - owner PT. Ijo, serta Prof. Joko Santoso dari IPB yang merupakan salah satu kontributor dari PT. Ijo. Diskusi ini dilakukan dalam rangka akselerasi hilirisasi komoditas rumput laut. Hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut: (1) Rumput laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk turunan lain, seperti biostimulan, yang memiliki nilai pasar USD 1,8 miliar. (2) PT. Ijo telah mengembangkan produk biostimulan rumput laut (RL) selama 6 bulan terakhir. Rumput laut tidak dapat menggantikan pupuk konvensional, tetapi dapat digunakan sebagai suplemen untuk pertumbuhan tanaman dan memperbaiki lahan yang terdegradasi. (3) Biostimulan RL produk PT. Ijo saat ini sudah dalam versi ketiga dan diaplikasikan pada beberapa komoditas pertanian. Hasil menunjukkan ada percepatan pertumbuhan dan perbaikan kualitas produk. Namun, biostimulan

RL kurang layak untuk padi secara ekonomi. (4) Disarankan untuk mengembangkan biostimulan dengan formulasi spesifik untuk kebutuhan tertentu, dengan menetapkan target komoditas dan output yang diharapkan. (5) Fokus aplikasi biostimulan RL sebaiknya pada komoditas yang luas dan menguntungkan, serta pada sektor perikanan. (6) Dukungan regulasi dan ekosistem usaha juga penting untuk mengatasi kendala, seperti membangun kerja sama dengan perusahaan besar dan meningkatkan penggunaan biostimulan di kalangan petani. Kesimpulan dari diskusi ini mencakup perlunya menetapkan target komoditas, membentuk ekosistem usaha, dan menyusun kebijakan dukungan.



Gambar 7. Diskusi Pengembangan Biostimulan Rumput Laut

4. Diskusi Hilirisasi Rumput Laut

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 secara hybrid di Ruang Rapat Branding, GMB 3 Lt. 15 dan online melalui aplikasi zoom. Tujuan pertemuan adalah untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan konsep hilirisasi rumput laut yang saat ini sedang disusun oleh Tim Direktorat Pengolahan. Diskusi dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua, dan Sekretris Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli), Soerianto Kusnowirjono (PT. Agarindo Bogatama), Boedi Sarjana (PT. Jasuda), Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si (IPB University), Hisworo Ramdani, S.Tp, M.Si (Universitas Trilogi), perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Direktorat Pengolahan. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pengolahan menjelaskan bahwa rumput laut adalah komoditas

penting di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ekspor rumput laut masih berupa bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan hilirisasi yang menyeluruh untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Tim dari Astruli memberikan tambahan informasi mengenai potensi pengembangan rumput laut, estimasi produksi, dan profil Astruli. Ketua Astruli menyoroti beragam produk rumput laut yang harus memperhatikan kebutuhan pasar. Rumput laut tropis Indonesia, terutama jenis karaginofit dan agarofit, memiliki peluang besar untuk produk hydrocolloid yang permintaannya terus meningkat. Untuk itu, kualitas dan kelangsungan bahan baku perlu dijamin. Selain itu, industri pendukung juga harus dikembangkan dan limbah harus dikelola dengan baik. Kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah dan asosiasi, sangat penting. Di masa depan, produk alternatif seperti biostimulan dan bioethanol juga bisa dikembangkan. Wakil Ketua Astruli menjelaskan bahwa produksi rumput laut sering berfluktuasi karena cuaca dan permintaan pasar. Indonesia adalah penghasil rumput laut terbesar kedua, namun ada ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan data produksi resmi. Konsolidasi data diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat. Sekretaris Astruli menambahkan bahwa Astruli berusaha menjadi mitra pemerintah dan ada 22 UPRL anggota. Utilisasi anggota Astruli saat ini sekitar 50-60%. Diskusi mencakup perlunya penguatan data, regulasi produk, dan optimasi UPRL eksisting. Tindak lanjutnya, tim akan memperbaiki konsep hilirisasi berdasarkan masukan.



Gambar 8. Diskusi Hilirisasi Rumput Laut

5. Pembinaan UPI Skala Mikro Melalui Kunjungan Lapangan

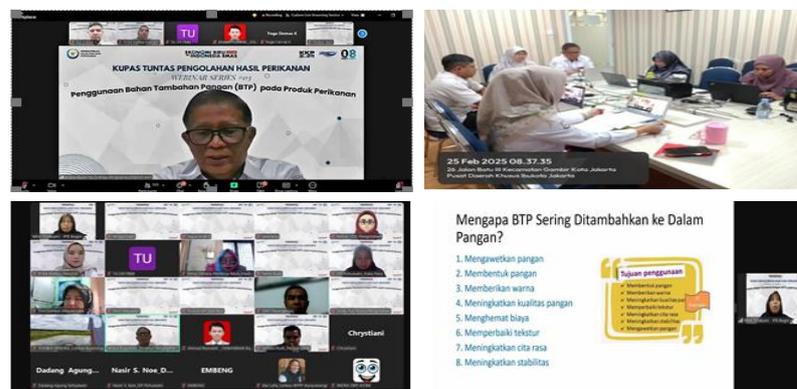
Kegiatan pembinaan melalui kunjungan lapangan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu: Kab. Bogor: Poklahsar Sabian Kuliner dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan. Blitar: Poklahsar Pawone Huliant, Poklahsar Gadung Melati dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan. Kab, Pati: Poklahsar Mina Makmur, Poklahsar Seger Jaya: kerupuk telur rajungan, dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan. Magelang: Pempek Lestari 22 Ilir, Keripik Belut Gavin, dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan. Tujuan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas produksi dan penerapan mutu program kelayakan dasar Good Manufacturing Practices (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap UPI skala mikro dan kecil. Pembinaan dilakukan terhadap beberapa substansi dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan penerapan mutu program kelayakan dasar Good Manufacturing Practices (GMP) antara lain: Legalitas usaha (Kusuka, NIB dan Sertifikat Standar) Legalitas produk (halal, PIRT, MD dan Merek) Teknik penanganan dan pengolahan ikan yang baik Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) Pada setiap UPI dilakukan profiling termasuk permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Tim pembina mutu yang ditugaskan memberikan saran, masukan kepada UPI terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dapat ditindaklanjuti.



Gambar 9. Pembinaan UPI Skala Mikro Melalui Kunjungan Lapangan

6. Webinar Pengolahan Series #3 dengan tema “Kupas Tuntas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pada Produk Perikanan”

Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang peran dan fungsi bahan tambahan pangan (BTP) dalam meningkatkan kualitas produk perikanan. Mengoptimalkan penggunaan BTP dengan memberikan panduan praktis tentang pemilihan, dosis, dan aplikasi BTP yang aman dan efektif. Meningkatkan kesadaran tentang regulasi dan keamanan pangan terkait penggunaan BTP dalam produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional. (IPB University) dengan materi yaitu Bahan Tambahan Pangan untuk Produk Perikanan, dengan pokok-pokok materi sebagai berikut: Prinsip penggunaan BTP yaitu hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi, gunakan BTP yang memiliki izin edar dan tidak melebihi batas maksimal, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat, dan baca takaran penggunaan sesuai tabel sediaan BTP. BTP dapat mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Narasumber menjawab semua pertanyaan secara detail terkait BTP sehingga mudah dipahami oleh peserta. Penggunaan BTP yang tepat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan mutu produk, memperpanjang masa simpan, serta mempertahankan cita rasa dan nilai gizi. Dua hal yang perlu digaris bawahi dalam pemberian BTP yaitu ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan dalam jumlah yang kecil.



Gambar 10. Webinar Pengolahan Series #3 dengan tema “Kupas Tuntas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pada Produk Perikanan”

7. Webinar Pengolahan Series #09 dengan tema “Kupas Tuntas *Frozen Seafood*: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan”

Tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang potensi dan peluang industri frozen seafood bagi UPI skala mikro dan kecil. Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UPI skala mikro dan kecil dalam memproduksi frozen seafood. Memberikan solusi praktis tentang teknologi pengolahan (pembekuan) seafood yang sesuai dengan skala usaha mikro dan kecil. Meningkatkan pemahaman tentang standar mutu, regulasi, dan sertifikasi yang diperlukan untuk produk frozen seafood. Pembekuan makanan adalah cara yang efektif dalam mengawetkan makanan karena bakteri penyebab kerusakan makanan tidak dapat tumbuh, bahkan mati, pada temperatur beku Tipe-tipe pembekuan, diantaranya adalah pembekuan cepat (suhu -250C sd -1960C selama 3 menit - 4 jam) dan pembekuan lambat (suhu -120C sd -240C selama 4 - 72 jam) Pelelehan/thawing/defrosting yang paling baik adalah dengan cara melelehkan produk secara lambat, dimana sebaiknya produk disimpan terlebih dahulu dalam lemari pendingin. Muhammad Kautsar (Bolekaka Dimsum 49) dengan materi Success Story Bolekaka, dimana narasumber menjelaskan tips dan trik UMKM bisa menjadi perusahaan besar Fokus pada masalah pelanggan, saat produk bisa menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan, maka bisnis tersebut lebih mudah diterima di pasar dan berkembang lebih pesat. Inovasi yang relevan dan sesuai dengan keinginan pasar akan membantu bisnis lebih cepat mendapatkan market fit. Bijak mengelola keuangan usaha, dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati, UMKM dapat meningkatkan keuntungan dan mengembangkan kapasitasnya menjadi lebih besar. Narasumber menjawab semua pertanyaan secara detail terkait frozen seafood dan success story usaha frozen seafood sehingga mudah dipahami oleh peserta. Sehingga, sesuai usulan para peserta, Direktorat Pengolahan membentuk whatsapp group untuk konsultasi lebih lanjut dan membantu merespon semua pertanyaan yang belum terjawab. e. Kesimpulan Frozen seafood memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan inovasi dalam teknologi pembekuan perlu terus

dikembangkan. Selain itu dengan pembekuan, ikan dan hasil laut lainnya dapat disimpan lebih lama, sehingga mengurangi risiko pemborosan makanan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu pembinaan kepada UPI MK yang memiliki produk frozen seafood terkait penerapan teknik penanganan dan pengolahan ikan yang baik yang sesuai standar mutu dan keamanan pangan, serta edukasi dan pendampingan dalam sertifikasi MD BPOM.



Gambar 11. Webinar Pengolahan Series #09 dengan tema “Kupas Tuntas Frozen Seafood: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan”

IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Persentase rancangan SNI produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya,

baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	25	12	-	100	25	15	-	-	100	25	-	-

Berdasarkan tabel di atas Indikator Kinerja (IK) tersebut bersifat triwulanan. IK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI pada triwulan I 2025 adalah sebesar 25% atau setara 100% dengan target triwulan I 2025 yakni 25% dan setara dengan 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100%. IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan dengan satuan produk.

Terdapat perbedaan satuan antara triwulan I 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI sebesar Rp 102.655.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 8.367.500,- atau sebesar 8,15% dari pagu anggaran.

Faktor kendala dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I, yaitu:

- Efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan penyusunan konsep RSNI tidak dapat dilaksanakan secara langsung (luring) sebagaimana direncanakan, namun dilakukan secara daring.
- Kehadiran komtek cukup sedikit karena kesibukan masing-masing anggota komtek.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I adalah perumusan 4 RSNI0 produk perikanan telah selesai dilaksanakan. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah diperlukan koodirnasi lebih awal untuk penjadwalan rapat komite teknis berikutnya agar anggota komtek dapat hadir semuanya.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI

Rapat dilaksanakan tanggal 14 Januari 2025 di RR Sekretariat GMB III Lt. 14. Rapat dibuka oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, serta dihadiri oleh Perwakilan dari BSN, Perwakilan unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP, dan Timja Lingkup Dit. Pembahasan Visi misi presiden dan wakil presiden 2024-2029 dan asta cita serta kebijakan ekonomi biru KKP menjadi acuan dalam kebijakan pengembangan standar produk kelautan dan perikanan KKP berperan dalam pengembangan SNI dan standar internasional dengan mengelola empat komite teknis, yaitu Komtek 65-05, Komtek 65-07, Komtek 65-08 dan Komtek 65-14. Rancangan Target Pengembangan Standar 2025 – 2029 Direktorat Pengolahan sebanyak 34 SNI dengan mengedepankan pengembangan usulan baru, revisi

standar yang diarahkan untuk : 1) Mendukung Hilirisasi perikanan; 2) Mendukung swasembada/ketahanan pangan; 3) Mendukung implementasi MBG; 4) Mendukung pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan sektor KP (Rumput Laut, Nila, Udang, Lobster, dll). Selain pengembangan SNI, penerapan SNI juga menjadi perhatian peserta rapat dengan menyampaikan diskusi dan usulan berupa: 1) UKM ber-SNI agar bisa dilibatkan pada bazar produk perikanan sehingga mendapatkan keuntungan dengan menerapkan SNI dan sebagai edukasi kepada UKM yang belum berSNI agar tertarik untuk mendapatkan sertifikat SNI; 2) Mekanisme penerapan SPPT SNI es untuk penanganan dan pengolahan ikan mendukung pabrik es yang telah dibangun oleh Dit. pengolahan tetapi terkendala LSPRO yang belum mempunyai ruang lingkup SNI es untuk penanganan dan pengolahan ikan. 5) Perlu dilakukan kajian untuk kemungkinan memberlakukan SNI secara wajib untuk SNI filet patin beku dan udang beku. e. Kesimpulan Perlu dilakukan kajian dan koordinasi dengan Unit Eselon I Lingkup KKP dan K/L terkait rencana usulan pengembangan SNI; Perlu dibuat strategi agar UKM dengan sukarela menerapkan SNI. Berkoordinasi dengan Unit Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP apabila akan mengusulkan tambahan usul SNI Produk Perikanan sesuai ruang lingkup periode 2025 – 2029.



Gambar 12. Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI

2. Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di RR Pembinaan Mutu GMB III Lt. 12A. Rapat dibuka oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, serta

dihadiri oleh Perwakilan dari BSN, dan pelaksana Timja Pengembangan dan Penerapan Standar, Dit. Pengolahan. Tujuan pelaksanaan rapat yaitu untuk mengidentifikasi hasil kaji ulang yang belum di tindak lanjut. Pembahasan Kaji Ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI. Hasil kaji ulang tersebut dilaporkan ke BSN disertai dengan RSNI6 jika direkomendasikan tetap, dan pengajuan abolisi untuk SNI yang direkomendasikan diabolisi. Hasil kaji ulang dengan rekomendasi revisi, komite teknis akan mengusulkan PNPS revisi SNI sesuai ketersediaan anggaran dan urgensinya. Untuk menindaklanjuti SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap akan dilakukan penyusunan RSNI6 oleh tim sekretariat komite teknis 65-05 dan 65-08, untuk kemudian diusulkan penetapan kembali ke BSN.



Gambar 13. Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan

3. Refreshment Konseptor dan Editor RSNI 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 melalui zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh Perwakilan Komtek, Konseptor, dan Editor SNI 65-05 Produk Perikanan dan Pelaksana pada Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar, Direktorat Pengolahan. Tujuan dilaksanakan Refreshment bagi konseptor dan editor ini adalah untuk memberikan

pemahaman dan peningkatan bagi konseptor/editor dalam mempersiapkan draft RSNI. Pembahasan Pada tahun 2025, Komtek 65-05 merumuskan 4 judul RSNI Produk perikanan, dengan melibatkan 8 konseptor yang berasal dari IPB dan BBP3KP. Materi disampaikan oleh BSN yaitu: - Kaidah Pengembangan SNI (Penyusunan dan Penerapan) - Pedoman Penulisan Standar Nasional Nasional nomor 4 Tahun 2023 - Simulasi Penulisan SNI Materi yang disampaikan untuk mempersiapkan penyusunan RSNI yang masuk di dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2025 sesuai dengan timeline yang telah direncanakan. Menyeragamkan format RSNI sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BSN Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman penulisan SNI sehingga akan mempermudah dalam koreksi, editing, dan pembahasan dengan Komite Teknis. Kesimpulan Diharapkan konseptor sudah menyesuaikan draft RSNI0 dengan Pedoman Penulisan SNI Nomor 4 tahun 2023.



Gambar 14. Refreshment Konseptor dan Editor RSNI 2025

4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Surveilans SNI Wajib

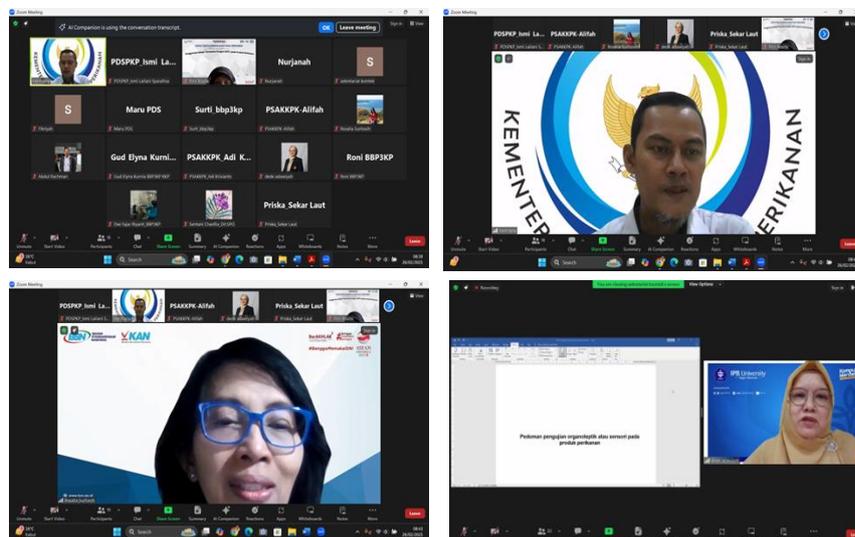
Rapat dilaksanakan tanggal 21 Februari 2025 melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Akreditasi, BSN, Tim Kerja Hukum, Tim Kerja Program, Tim Kerja Data dan Pelayanan Publik, dan Tim Kerja Lingkup Dit Pengolahan. Tujuan rapat yaitu menindaklanjuti surat Kepala BBP3KP nomor B.216/BBP3KP/PDS.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal

Surveilans Sertifikasi SNI Wajib yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran. Pembahasan Pimpinan rapat menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu layanan publik pada masyarakat termasuk pelaksanaan surveilans penerapan SNI Wajib untuk SNI tuna dalam kemasan kaleng dan SNI sarden dan Mackerel dalam kemasan kaleng. BBP3KP menyampaikan dalam rapat bahwa : (1) anggaran pelaksanaan audit proses produksi dalam rangka surveilans pada tahun 2025 mengalami efisiensi anggaran, (2) terdapat peluang untuk melaksanakan audit dengan metode remote sesuai pasal 9 ayat 27 Peraturan Menteri KP nomor 32 Tahun 2023 namun harus memenuhi kriteria *force majeure*/keadaan kahar serta (3) petunjuk teknis metode pelaksanaan remote audit. BBP3KP menyampaikan bahwa Tahun 2025 tidak tersedia lagi alokasi anggaran di BBP3KP yang dapat direvisi untuk mendukung pelaksanaan surveilans SNI wajib (untuk membiayai uang harian petugas audit), termasuk yang bersumber dari penggunaan PNBP. Kesimpulan Berdasarkan referensi dan peraturan perundangan, efisiensi anggaran bukan termasuk *force majeure*/keadaan kahar sehingga tidak bisa dijadikan dasar remote audit. Untuk mendukung proses audit proses produksi pada Surveilans Pertama SNI Wajib sesuai Pasal 28 ayat 3 Peraturan Menteri KP nomor 32 Tahun 2023 yang berbunyi “surveilans pertama dilakukan melalui audit proses produksi di UPI yang sedang melakukan produksi terhadap produk yang diajukan”, kami mengusulkan: Jangka pendek • Penerbitan SE tentang remote audit yang berlaku pada semua LS Pro. Jangka menengah • Revisi Permen KP 32 Tahun 2023 tentang pelaksanaan SNI Wajib Tuna Kaleng dan SNI Sarden dan Mackerel Kaleng khususnya pasal 29 ayat 7 yang saat ini mengatur remote audit diperkenankan hanya saat *force majeure*/keadaan kahar. • Revisi PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memasukan komponen Honor Personal ditanggung oleh Klien.

5. Rapat RSN11 Komtek 65-05 Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan tanggal 26 – 27 Februari 2025 melalui zoom meeting. Rapat dihadiri oleh 26 orang terdiri dari 10 anggota Komtek 65-05, 8 orang Konseptor, 8 orang sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSN1 produk perikanan serta

perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN. Tujuan rapat yaitu membahas konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI0 berdasarkan data dukung dan literatur. Pembahasan Kegiatan RSNI1 65-05 ini dilaksanakan selama 2 hari yang terbagi menjadi 2 sesi pada setiap harinya. Pembahasan konsep RSNI0 berupa presentasi konsep oleh masing-masing konseptor dan diskusi oleh seluruh peserta rapat. Rapat membahas 4 RSNI Produk Perikanan yaitu: Pedoman pengujian organoleptik atau sensori pada produk perikanan Kerupuk ikan, krustasea, dan moluska siap makan Pempek; dan Agar-agar kertas Beberapa perubahan yang disepakati antara lain Perubahan judul Pedoman pengujian organoleptik atau sensori pada produk perikanan menjadi “Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan”. Untuk judul Kerupuk Ikan, Krustasea, dan moluska siap makan, perlu disesuaikan dengan ruang lingkup. pada bibliografi Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan RSNI1 yang telah dilaksanakan secara online, Komite Teknis menyepakati 4 dokumen RSNI1 yang telah dibahas. Selanjutnya konseptor melakukan perbaikan konsep sesuai masukan yang telah diberikan oleh peserta rapat untuk dijadikan bahan pada pembahasan rapat teknis RSNI1 65-05.



Gambar 15. Rapat RSNI1 Komtek 65-05 Produk Perikanan

IK 3. Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	3	-	-	100	8	-	-	8	120	8	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP pada triwulan I 2025 adalah sebesar 8% atau setara 120% dengan target triwulan I 2025 yakni 3%, dan setara dengan 8% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100. IK tersebut adalah bersifat triwulanan. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP sebesar Rp 46.448.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 5.743.900,- atau sebesar 12,37% dari pagu anggaran.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I, adalah keterbatasan wawasan pembina mutu daerah dalam melakukan pembinaan ke UPI karena banyaknya perubahan dalam struktur organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan daerah. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I, adalah persiapan personil pembina mutu daerah dalam terhadap materi penerapan mutu dalam mendukung program prioritas Pemerintah saat ini. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu mengadakan kegiatan peningkatan capacity building kepada Pembina Mutu dan UPI dalam hal penerapan mutu produk perikanan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan

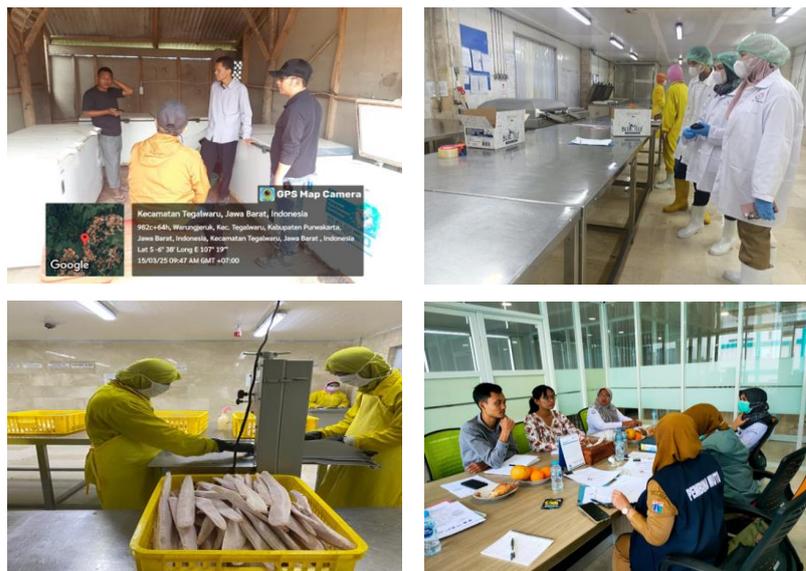
Pelaksanaan pembinaan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 – 15 Maret 2025, bertempat di Jakarta, Purwakarta, dan Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan pembina mutu Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah setempat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari UPI yang dituju. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan verifikasi lapangan dan pembinaan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan SSOP bagi UPI dalam rangka penerbitan rekomendasi SKP. Kegiatan pembinaan UPI diawali dengan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan dari UPI yang dikunjungi mengenai beberapa hal, diantaranya :

- Penerapan GMP dan SSOP, pasar, dokumen perizinan, panduan mutu, rekaman data, berkas pemeriksaan kesehatan karyawan, dokumen hasil cek lab, serta data Perusahaan.
- Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke ruang pengolahan UPI untuk melakukan monitoring dan pembinaan setiap area di ruang

pengolahan, diawali dari lingkungan sekitar UPI, area masuk ruang pengolahan, area penerimaan bahan baku sampai dengan ruang penyimpanan. Selain itu dilakukan juga monitoring dan pembinaan terhadap kegiatan aktivitas pengolahan serta sarana prasarana di dalam UPI.

- Hasil dari proses verifikasi dan pembinaan selanjutnya dilakukan diskusi bersama dengan Dinas dan UPI, mengacu pada temuan yang ditemukan serta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi.
- Dalam diskusi juga dibahas terkait kendala yang dihadapi UPI dalam proses produksi juga menjadi pembahasan untuk dibantu dicari alternatif solusi pemecahannya.

Hasil dari verifikasi dan pembinaan UPI diarahkan untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang menjadi catatan dari hasil verifikasi UPI diminta untuk selalu melakukan koordinasi dengan Pembina Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah setempat serta Pembina Mutu Pusat dari KKP.



Gambar 16. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan

2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025, bertempat dikantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dilaksanakan secara daring, dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan

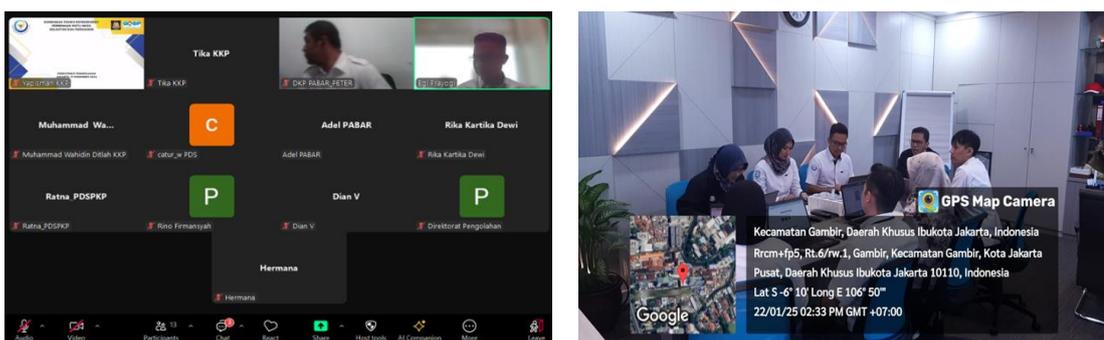
Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, Pengelola Satker BPP3KP Ambon, Pimpinan Koperasi Konsumen Syariah Sabena Jaya PPS Kutaraja, Pimpinan Poklhasar Samudera Tuna dan Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan serta perwakilan dari tim kerja Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi Sarana Pasca Panen (SPP) agar dilakukan pemanfaatan sesuai tujuan. Beberapa hal disampaikan, antara lain lokasi SPP, legalitas perizinan, dan tantangan operasional yang dihadapi, seperti pemasangan listrik yang dijadwalkan pada Januari 2025. Juga disoroti masalah biaya untuk pembelian kabel listrik. Pihak pengelola dan Dinas KP Seram Barat akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku usaha berharap masa depan produk perikanan dapat dijual secara lokal. SPP mengalami kendala bahan baku terutama untuk tepung ikan, dan hasil minyak ikan belum maksimal. Meskipun mesin penggiling telah diterima, hasil operasional belum optimal. SPP berharap dukungan dari KKP untuk memperbaiki peralatan agar dapat memulai produksi. Fasilitasi SPP diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor perikanan melalui perbaikan pengolahan hasil perikanan.



Gambar 17. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh

3. Koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

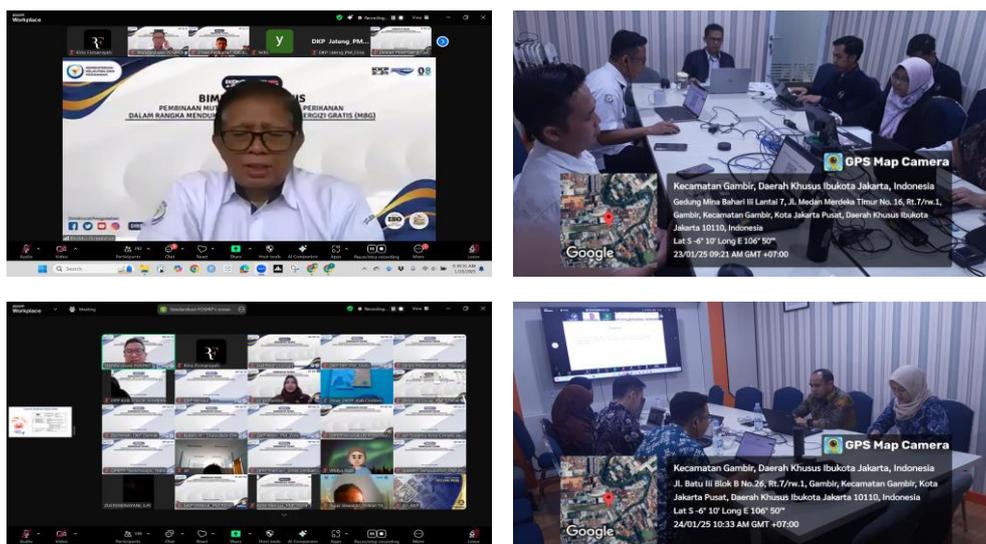
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025, bertempat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid, dipimpin oleh Katimja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sehubungan dengan perubahan organisasi yang baru dimana proses penerbitan sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan untuk Direktorat Pengolahan fokus melakukan pembinaan. Beberapa hal disampaikan, antara lain lokasi SPP, legalitas perizinan, dan tantangan operasional yang dihadapi, seperti pemasangan listrik yang dijadwalkan pada Januari 2025. Juga disoroti masalah biaya untuk pembelian kabel listrik. Pihak pengelola dan Dinas KP Seram Barat akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku usaha berharap masa depan produk perikanan dapat dijual secara lokal. SPP mengalami kendala bahan baku terutama untuk tepung ikan, dan hasil minyak ikan belum maksimal. Meskipun mesin penggiling telah diterima, hasil operasional belum optimal. SPP berharap dukungan dari KKP untuk memperbaiki peralatan agar dapat memulai produksi. Kesimpulannya, fasilitasi SPP diharapkan meningkatkan daya saing sektor perikanan melalui perbaikan pengolahan hasil perikanan.



Gambar 18. Koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

4. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2025 secara *hybrid*. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dihadiri Pembina Mutu lingkup wilayah Barat (Pulau Sumatera dan Pulau Jawa). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mempersiapkan personil pembina mutu Pusat dan daerah untuk untuk akselerasi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan sekaligus mendukung program Pemerintah untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG). Materi yang disampaikan mencakup Jenis-Jenis Ikan dan Proses Kemunduran Mutu, Teknik Penanganan Ikan, Pengawasan Pangan Olahan, dan Pengujian Organoleptik Hasil Perikanan. Selain itu, panduan kelayakan pengolahan ikan juga menjadi bagian dari materi. Pada hari pertama, materi tentang Jenis Ikan dan Kemunduran Mutu dibahas untuk membantu pengawasan program MBG dan mencegah masalah kesehatan. Teknologi Penanganan Ikan dan Pengawasan Pangan Olahan juga dijelaskan untuk memastikan keamanan pangan. Di hari kedua, materi tentang Penerapan Kelayakan Pengolahan dan Penyusunan Panduan Mutu GMP SSOP disampaikan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta menyatakan bahwa Bimtek ini sangat menambah wawasan dan berharap kegiatan serupa diadakan kembali. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk mempersiapkan pembina mutu agar dapat ikut mendukung program Makanan Bergizi Gratis dengan lebih baik.

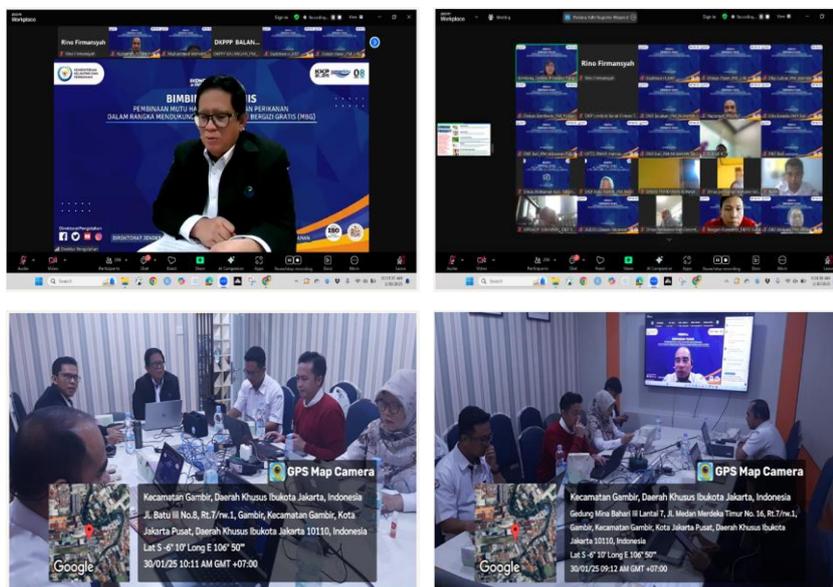


Gambar 19. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG)

5. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2025 secara *hybrid*. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dihadiri Pembina Mutu Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah lingkup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mempersiapkan personil pembina mutu Pusat dan daerah untuk akselerasi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan sekaligus mendukung program Pemerintah untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan beberapa materi yaitu : Jenis-Jenis Ikan dan Proses Kemunduran Mutu oleh Direktorat Pengolahan, Teknik Penanganan Ikan Oleh Direktorat Pengolahan, Pengawasan Pangan Olahan Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pengujian Organoleptik Hasil Perikanan Oleh BBP3KP, Penerapan Kelayakan Pengolahan Ikan Oleh Direktorat Pengolahan, serta Penyusunan Panduan Kelayakan Pengolahan Ikan Oleh Direktorat Pengolahan. Pengawasan Pangan Olahan yang disampaikan oleh Sondang Widya Estikasari, S.Si,Apt.MKM selaku Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM. Pada materi ini dijelaskan tentang definisi keamanan pangan yang merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, dasar hukum pengawasan pangan BPOM, perizinan produksi pangan olahan asal ikan, faktor-faktor risiko foodborne disease, cara produksi pangan olahan yang baik, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, serta Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan. Teknologi Penanganan Ikan disampaikan oleh Muhammad Wahidin, S.St.Pi.M.AP. Pada materi ini dijelaskan Acuan dan Dasar Hukum dari Teknik Penanganan Ikan, definisi dari Penanganan Ikan, prinsip dari penanganan ikan, cara penyimpanan hasil perikanan, cara penanganan diatas kapal, penanganan hasil perikanan pada sarana pasca panen di perikanan budidaya, penanganan hasil perikanan di tempat pelelangan ikan, penanganan

hasil perikanan saat distribusi, teknologi penanganan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan. Terakhir mengenai penerapan teknologi penanganan hasil perikanan di Unit Pengumpul/Supplier. Jenis Ikan dan Kemunduran mutu yang disampaikan Oleh Ratna Mariyana, S.Pi, MM dari Direktorat Pengolahan. Materi ini dianggap penting karena mendukung program Asta Cita Makan Bergizi Gratis, Pembina mutu diharapkan mengawal program ini agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan seperti kejadian luar biasa keracunan makanan atau Foodborne Illnesses dengan cara menguasai materi jenis-jenis ikan dan segala resiko bahaya pada resiko tersebut. Pada materi dijelaskan terkait persyaratan mutu dan keamanan ikan segar, komposisi ikan Dalam pelaksanaan dua hari kegiatan, diberikan juga pretest pada hari pertama kegiatan dan post-test di hari kedua untuk melihat kemampuan pembina mutu dalam hal pembinaan mutu produk hasil perikanan. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis dilaksanakan sebagai salah satu upaya mempersiapkan personil pembina mutu Pusat dan Daerah untuk akselerasi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan sekaligus mendukung program Pemerintah untuk Makanan Bergizi Gratis.



Gambar 20. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB).

Penghitungan VPO skala Menengah Besar dilakukan melalui penarikan data volume dan jenis produk UPI Skala Menengah Besar (UPIMB) yang tercatat dalam data BP2MHKP dan Badan Karantina Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi data ekspor dan domestik keluar. Data lalu lintas ikan digunakan sebagai pendekatan dalam penghitungan VPO UPI MB, karena menyediakan data volume dan jenis produk olahan yang diproduksi oleh UPI MB.

Pengumpulan data volume produk olahan unit pengolahan ikan dan utilitas tahun 2024 dilaksanakan di 38 Provinsi di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tigabelas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1) pendinginan/pengesanikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringanikan, 4) pemindanganikan, 5) pengasapan/pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan, 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penangananikan, dan 13) pengolahan ikan lainnya Data yang disajikan adalah data volume produk olahan dan volume produk setara segar per bulan per kab/kota.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan ditargetkan mencapai 3,71% pada tahun 2025. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat semesteran, yang capaiannya akan diukur pada triwulan II. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 294.717.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 27.997.600,- atau sebesar 10% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I, yaitu:

- Ketersediaan data lalu lintas ikan sebagai dasar penghitungan volume produk olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar menggunakan rentang kendali eksternal diluar Ditjen PDSPKP dan KKP. Karena sumber data berasal dari BBPMHKP dan Badan Karantina Indonesia (BKI), sehingga dibutuhkan perjanjian kerja sama KKP dan BKI.
- Perolehan data untuk updating populasi UPI Skala Menengah Besar tahun 2025 yang diperoleh dari K/L lain membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan tahapan pendataan (penetapan kerangka sampling pendataan, petugas pendataan).

Faktor keberhasilan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I, yaitu:

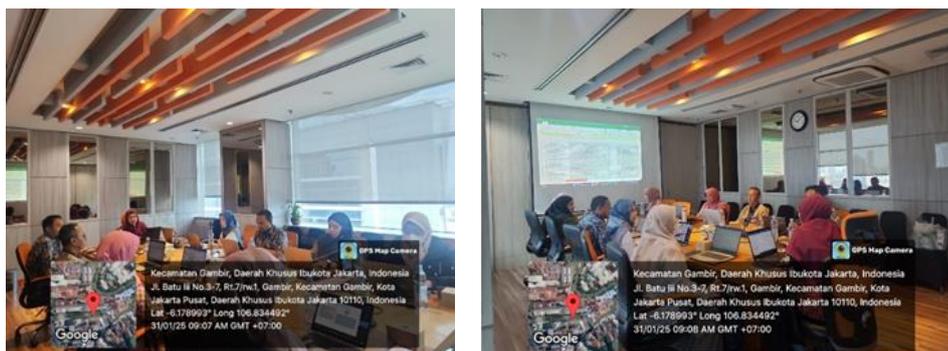
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Setditjen PDS, Pusdatin KKP, Badan Karantina Ikan, BPS, Kementerian Perindustrian) yang berkaitan dengan penghitungan VPO dan populasi tahun 2025.
 - Petugas pendataan (validator dan enumerator) VPO 2025 melibatkan Penyuluh dan Dinas KP Provinsi/Kab/Kota.
 - Koordinasi dan sinergi persiapan pendataan dilakukan secara daring
- Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu:

- Perlu sinergitas dan koordinasi berkala dengan BKI dan BBPMHKP untuk perolehan data lalu lintas ikan sebagai sumber data volume produk olahan Tahun 2025.
- Review ulang terkait usulan kerangka sampling setelah penerapan efisiensi anggaran.
- Proses revisi RKA-KL dalam rangka penyesuaian mekanisme honorarium dan kegiatan pendukung (pendampingan pendataan, penugasan SDM, monitoring, dll)
- Pelaksanaan koordinasi pendataan secara daring

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Pertemuan Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025

Pertemuan pembahasan populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka persiapan pendataan volume produk olahan tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar pada hari Jumat, 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Investasi Gedung Mina Bahari 3 lantai 15. Pertemuan dihadiri perwakilan Direktorat Statistik Industri - Badan Pusat Statistik, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro - Kementerian Perindustrian, Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP. Populasi UPI Menengah Besar tahun 2024 sebanyak 1.480 unit, telah dilakukan updating data melalui korespondensi ke seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Hingga akhir Januari 2025, 16 provinsi telah memberikan update data populasi UPI Menengah Besar dan terdapat selisih jumlah UPI Menengah Besar sebanyak 63 unit dibandingkan tahun 2024, sehingga jumlah populasi UPI MB sebanyak 1.417 unit (update data sementara).



Gambar 21. Pertemuan Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025

2. Rapat Finalisasi Perhitungan Volume Produk Olahan dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar

Dalam rangka Rapat Finalisasi Perhitungan Volume Produk Olahan dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 secara daring melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB, dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Statistik Industri BPS, Pusat Data dan Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Badan Karantina Ikan, Pusdatin KKP, BPPMHKP, Timja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Timja PUP2MK, Timja PLKP, Timja Dukman, Tenaga Ahli dari PSKPL IPB, serta anggota timja PUP2MB.

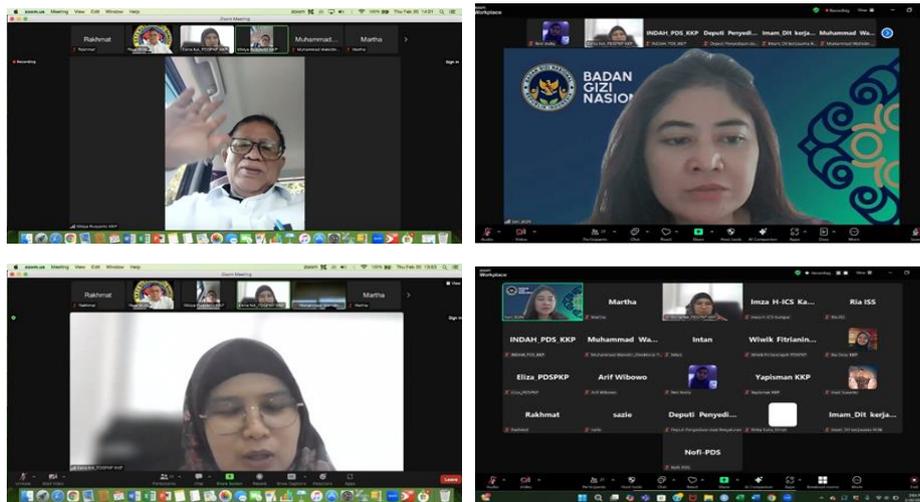
Kegiatan tersebut bertujuan memaparkan hasil akhir (prognosa) perhitungan VPO dan Utilitas UPI Skala Menengah Besar serta menjaring masukan dalam upaya penyempurnaannya. Volume Produk Olahan UPI MB tahun 2024 yaitu sebesar 2.638.803.576,02 kg atau tumbuh 8,81% dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian Utilitas UPI menengah besar pada triwulan III tahun 2024 mencapai 68,26%. Capaian utilitas ini belum bisa didapat angka finalnya, hal ini dikarenakan belum lengkapnya data sarana dan prasarana UPI yang telah dikumpulkan. Data sarana dan prasarana ini merupakan dasar untuk menentukan kapasitas produksi UPI. Perlu dilakukan perhitungan kembali untuk VPO dan Utilitas.



Gambar 22. Rapat Finalisasi Perhitungan Volume Produk Olahan dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar

3. Rapat Persiapan Sosialisasi Peluang Kerjasama Pemenuhan Pasokan Produk Perikanan Antara Unit Pengolahan Ikan dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Rapat dilaksanakan pada 7 Maret 2025 secara daring melalui zoom meeting. dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Katimja Kerjasama dan Humas, dan Perwakilan Timja Lingkup Dit Pengolahan serta Anggota Timja PUP2MB. Tujuan diadakan rapat untuk memperoleh masukan terkait judul, materi sosialisasi, narasumber, rundown dan mekanisme pelaksanaan serta penyusunan panitia kegiatan.



Gambar 23. Rapat Persiapan Sosialisasi Peluang Kerjasama Pemenuhan Pasokan Produk Perikanan Antara Unit Pengolahan Ikan dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

4. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi UPI Nilai Tambah Kabupaten Tulungagung

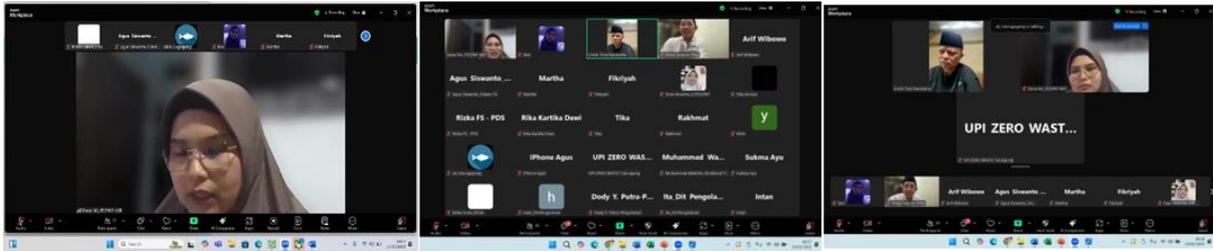
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Unit Pengolahan Ikan Nilai Tambah (UPI NT) Kabupaten Tulungagung pada hari Jumat, 14 Maret 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dihadiri perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung, Perwakilan PT. Delta Mina Perkasa selaku Pengelola UPI NT Tulung Agung, dan Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP.

Beberapa masukan untuk optimalisasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi UPI NT Kabupaten Tulung Agung antara lain :

- UD Gambir Sejahtera perlu melakukan inovasi produk dan ekspansi pasar. Dalam melakukan inovasi dan ekspansi pasar, UPI agar melakukan konsolidasi

internal karena hal tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan UPI. Selain itu juga perlu dilakukan survei pasar terlebih dahulu.

- Pemanfaatan limbah kulit patin perlu dioptimalkan, mengingat berdasarkan kajian awal camilan kulit ikan patin merupakan produk yang cukup menjanjikan, bahkan sudah ada UPI yang melakukan ekspor produk ini.
- Perlunya komitmen kuat dari UPI untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran.
- SKP produk bakso Kerikil tidak perlu dibuat mengingat secara proses pengolahan dan bahan baku yang digunakan tidak berbeda dengan bakso ikan, yang membedakan hanya bentuk bahan baku berupa daging patin yang di-trimming.
- Untuk menekan biaya perbaikan saluran yang tersumbat, dikarenakan belum tersedia anggaran dari Dinas, maka UPI disarankan menggunakan jasa pelayanan penanganan saluran yang tersumbat melalui <https://www.rooterindo.id/>.
- Terkait biaya sewa yang belum dapat dipenuhi oleh pengelola, Dinas Perikanan dan Kelautan akan melakukan review terhadap nilai yang ditetapkan KJPP. Selain itu dinas juga akan melakukan review terhadap PKS kedepannya agar biaya perbaikan/pemeliharaan yang dikeluarkan UPI dapat menjadi pengurang dari biaya sewa yang dibayarkan UPI.
- Dinas diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap UPI NT Tulungagung sesuai dengan komitmen pemda saat pengusulan bantuan pemerintah, sehingga jika diperlukan perbaikan dapat segera dilakukan.
- Dinas diharapkan dapat membuat profil pemanfaatan UPI NT berupa narasi atau paparan atau video, sebagai bahan monitoring, evaluasi dan sukses story pengelolaan.



Gambar 24. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi UPI Nilai Tambah Kabupaten Tulungagung

5. Rapat Usulan Kerangka Sampling Pendataan Volume Produk Olahan TA 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 di Ruang Rapat Investasi, Gedung Mina Bahari III Lt. 15. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data Statistik dan Informasi, Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP; dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu penetapan populasi dan kerangka sampling pendataan tahun 2025 dan Pemetaan kebutuhan petugas data. Menyiapkan konsep bahan koordinasi yang berisi antara lain: titik sampling, populasi, mekanisme pendataan, dan output yang berasal dari penyuluh. Menyiapkan data UPI yang sudah memiliki SKP dan penerima DAK dengan mapping per kab/kota. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin dalam penyiapan data dukung pembayaran honor berupa dashboard capaian pendataan dan/atau rekap input validator untuk data pendukung validasi dan homogenitas agregat bulanan. Sosialisasi aplikasi PortalData baru untuk pendataan Kusuka maupun produksi ke Kab/Kota.

6. Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 di Ruang Rapat Akses Pasar, Gedung Mina Bahari III, Lantai 15. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data Statistik dan Informasi, Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP; dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu, penyesuaian target kegiatan pendataan VPO pasca efisiensi anggaran, Mekanisme pendataan VPO UPI Tahun 2025 (efisiensi anggaran), dan Pembahasan pedoman pendataan VPO UPI Tahun 2025. Menindaklanjuti Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dibutuhkan alternatif pendataan VPO tahun 2025. Alternatif ini mencakup

pengurangan 300 kabupaten/kota di 36 provinsi, pengurangan petugas pendataan, dan pengurangan bulan pada honorarium pendataan. Pedoman pendataan VPO 2025 juga disesuaikan dengan pedoman 2024. Kesimpulan menyebutkan bahwa pendataan dilakukan di 38 Provinsi oleh petugas enumerator dan divalidasi oleh validator. Anggaran yang dialokasikan tidak mencakup honorarium untuk petugas pendataan. Kerangka sampling ditentukan berdasarkan data yang diinput, dan kebutuhan nama petugas pendataan akan diajukan secara resmi.



Gambar 25. Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025

IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Unit Bantuan Pemerintah yang dimanfaatkan oleh penerima bantuan yang diadakan pada tahun berjalan. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa chest freezer dan peralatan pengolahan. Pemberian bantuan ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dan menjaga mutu produk olahan, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha pengolahan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dukungan sarana tersebut, diharapkan para pelaku pengolahan, utamanya UPI pengolahan skala mikro dan kecil dapat lebih optimal dalam menerapkan standar kualitas, memperpanjang masa simpan produk, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Capaian dari fasilitasi bantuan pemerintah ini diukur melalui Indikator Kinerja "Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan". Indikator ini mencerminkan sejauh mana bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, baik dalam meningkatkan volume produksi, mutu produk, maupun kontribusi terhadap pertumbuhan usaha pengolahan di daerah. Dengan demikian, keterhubungan antara program bantuan pemerintah dengan indikator ini sangat erat, karena tingkat pemanfaatan bantuan menjadi parameter keberhasilan program dalam mendukung target strategis Direktorat Pengolahan. Realisasi indikator ini juga menjadi bagian penting dalam evaluasi efektivitas program dan penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Target pemanfaatan bantuan pemerintah pada Triwulan I adalah 0%, dengan pertimbangan: Kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan awal serta belum ada pelaksanaan fisik pengadaan maupun penyaluran bantuan. Pada Triwulan I Tahun 2025 kegiatannya berfokus pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang mencakup dua jenis bantuan, yaitu: *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan (PP). Kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen pendukung, koordinasi lintas unit, serta pelaksanaan monitoring awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan tahun 2025 ditargetkan mencapai 80%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat triwulanan, yang capaiannya akan diukur pada triwulan III. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan sebesar Rp 117.689.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 78.179.300,- atau sebesar 66,43% dari pagu anggaran.

Faktor kendala dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I adalah adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan I adalah koordinasi dengan stakeholders terkait. Rekomendasi kegiatan selanjutnya, yaitu: finalisasi petunjuk teknis penyaluran bantuan, finalisasi spesifikasi teknis barang, proses pengadaan barang melalui e-Katalog versi terbaru, penetapan penerima manfaat dan jadwal distribusi bantuan, koordinasi lanjutan dengan unit terkait untuk percepatan realisasi.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi (monev) awal pemanfaatan *Chest Freezer (CF)* dan Peralatan Pengolahan

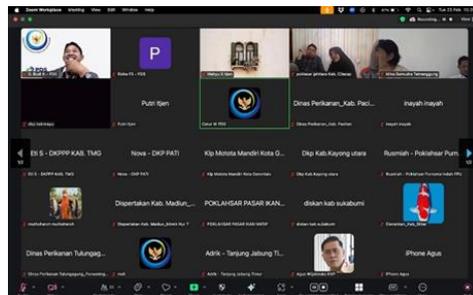
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan spesifikasi CF dan PP sesuai dengan kebutuhan kelompok pengolahan tahun 2025. Monitoring dilakukan melalui surat, rapat koordinasi, dan kunjungan lapang. Surat-surat yang dikirim mencakup laporan kebermanfaatn bantuan pemerintah. Rapat koordinasi dilaksanakan pada 25 Februari 2025, dan kunjungan lapang dilakukan di beberapa Poklamsar pada akhir Maret 2025. Hasil monitoring menunjukkan CF dan PP telah diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok.



Gambar 26. Monitoring dan evaluasi (monev) awal pemanfaatan *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan

2. Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa

Koordinasi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2025. Dari hasil koordinasi didapatkan informasi antara lain bahwa saat ini pengadaan barang/jasa sudah menggunakan aplikasi e-Katalog versi 6. Dalam versi terbaru ini, terdapat perubahan mekanisme kontrak yang dilakukan untuk setiap pengadaan barang/jasa. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian teknis agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan terbaru.



Gambar 27. Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa

3. Monitoring Pemanfaatan BP Pabrik Es *Portable* (PEP) 2024

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Direktur Pengolahan, Sekretaris Dinas Perikanan, perwakilan PT Tamacool Sukses Perkasa, dan Koperasi Produsen Keluarga Nelayan Semilir. PEP berkapasitas 1 ton per siklus mulai berproduksi pada Januari 2025 dan berlokasi di Kawasan Semilir Resort. Proses pembuatan es balok menghasilkan 88 balok dalam 12 jam, namun suhu dalam ice storage $+50^{\circ}\text{C}$ menyebabkan es meleleh. Es dipasarkan di PPI Popoh dan PT Delta Mina Perkasa seharga Rp 4.000/balok. Dinas

Perikanan akan membantu koordinasi, dan PT Tamacool akan mengatur mesin untuk optimalisasi produksi. Direktur menginstruksikan kesepakatan harga es dan perbaikan instruksi operasional mesin.

IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Diversifikasi produk merupakan salah satu Upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Diversifikasi produk dilakukan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyesuaikan dengan perkembangan industry dan kebutuhan pasar.

Diversifikasi produk yg dibina menuju penerapan diversifikasi produk dan / kemasan bernilai tambah kepada pelaku usaha pengolahan skala mikro,kecil dan menengah agar produk dapat diadopsi, diduplikasi direplikasi dan diproduksi untuk menambah nilai.

Persentase pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah yang telah diperkenalkan diversifikasi produk bernilai tambah, dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah diperkenalkan pada triwulan I telah tercapai 10% dari total target tahunan, dibandingkan dengan pelaku usaha yang ditargetkan dalam rencana kerja Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	10	-	-	100	10	-	-	10	10	10	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah pada triwulan I 2025 adalah sebesar 10% atau setara 100% dengan target triwulan I 2025 yakni 10% dan setara dengan 10% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100%. Indikator Kinerja (IK) tersebut adalah bersifat triwulanan IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk dengan satuan UMKM. Terdapat perbedaan satuan antara triwulan I 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah sebesar Rp 924.345.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 85.245.500,- atau sebesar 9,22 % dari pagu anggaran.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I, yaitu :

- Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi lebih banyak dilakukan secara daring dan efektifitas kegiatan tidak optimal dikarenakan:
 - a. Terkendala jaringan di daerah
 - b. Akses teknologi dan informasi UMKM masih minim.
- Pelaksanaan keseluruhan kegiatan terbatas karena tidak ada dukungan anggaran sebagai contoh pembelian bahan baku dan enzim uji coba HPI, pembelian bahan baku untuk uji coba praktek pengolahan.

Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I, yaitu:

- Koordinasi dan sinergi kegiatan pembinaan dilakukan secara daring dan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan.
- Dengan keterbatasan anggaran, dalam melakukan kegiatan bekerjasama dengan instansi lain dan swasta.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu :

- Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah melalui Workshop/Sosialisasi/Webinar secara daring
- Bekerjasama dengan instansi lain, BUMN dan swasta.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan

a. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi mie dan kue glundung HPI

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi mie dan kue glundung HPI dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 secara hibrid yaitu offline di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan dan di Ruang Worksop BBP3KP Jakarta serta secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti sebanyak 330 peserta serta dihadiri secara offline di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan - Bapak Doni

Ismanto, Direktur Pengolahan, Kepala Dinas Perikanan Kota Pekalongan, serta pelaku usaha sekitar UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya HPI kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan. Praktek pengolahan mie dan kue glundung HPI yang dipimpin oleh Koperasi Matsya Marine Raya dan Tim BBP3KP dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing.

b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Pilus Ikan Nila

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi pilus ikan nila dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 secara hybrid yaitu *offline* di BBP3KP Satker Mataram dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 429 peserta wokshop melalui Zoom Meeting dan 98 peserta melalui youtube yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan nila kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan. Praktek pengolahan Pilus ikan nila yang dipimpin oleh Tim BBP3KP satker Mataram dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing.

c. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Gohyong Tuna

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Gohyong Tuna dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 secara *hybrid* yaitu *offline* di BBP3KP Satker Mataram dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 383 peserta wokshop melalui Zoom Meeting dan 672 peserta melalui youtube yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan.

Praktek pengolahan gohyong tuna yang dipimpin oleh Tim BBP3KP satker Mataram dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing.

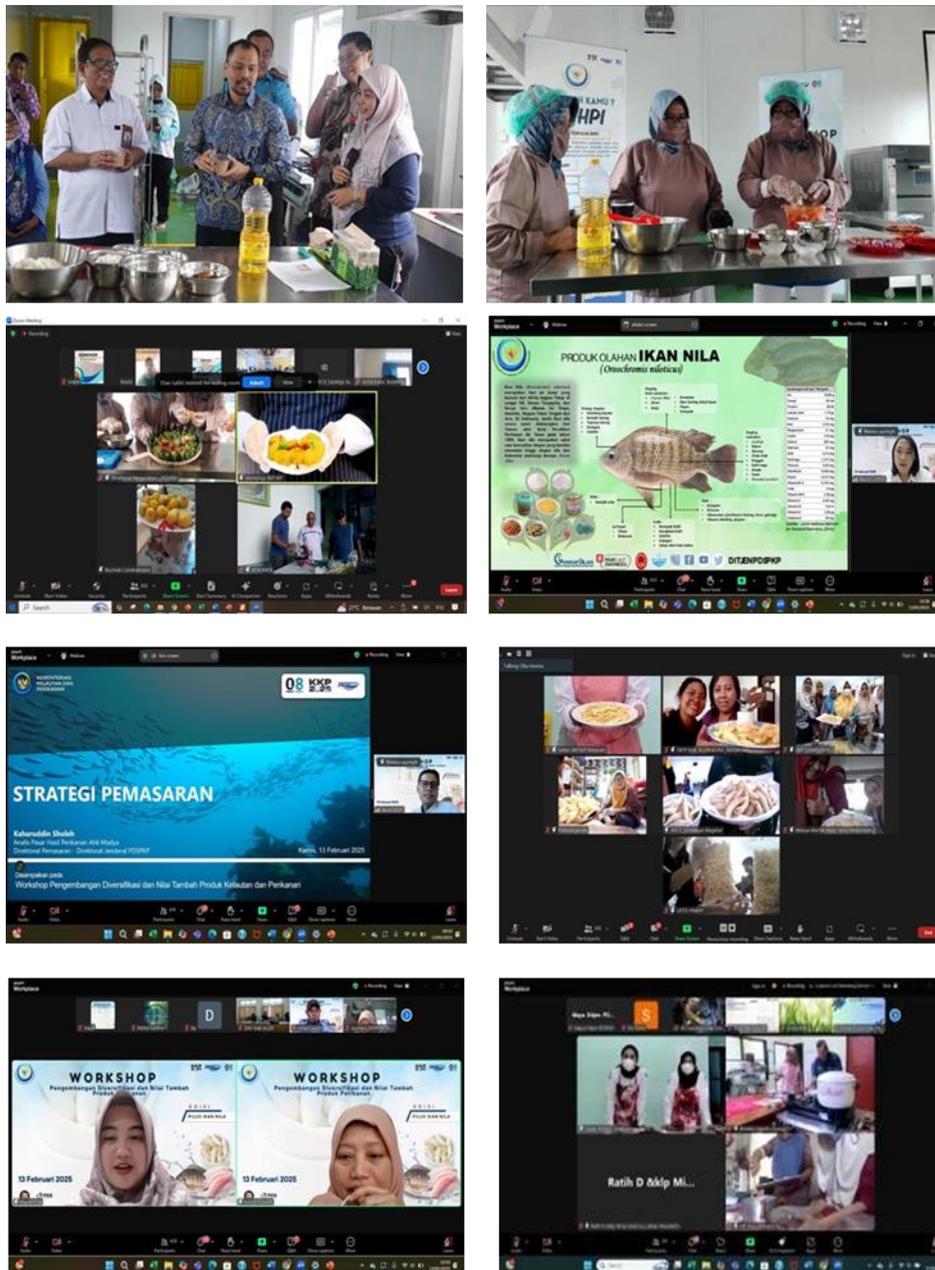
d. *Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Cendol Rumput Laut*

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi cendol rumput laut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 secara *hybrid* yaitu *offline* di BBP3KP Satker Ambon dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 500 peserta melalui zoom meeting dan 95 peserta melalui youtube yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk Meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan. Materi yang disampaikan pada workshop yaitu Materi Potensi, Produk dan Peluang Usaha Rumput Laut dari Rumput Laut Center. Praktek pengolahan cendol rumput laut yang dipimpin oleh Tim BBP3KP satker Ambon dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing.

e. *Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Rolade Tuna*

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi rolade tuna dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025 secara hibrid yaitu offline di BBP3KP Satker Ambon dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 502 peserta melalui zoom meeting dan 175 peserta melalui youtube yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan. Materi yang disampaikan pada workshop yaitu Materi Akselerasi Penumbuhan Wirausaha Kelautan dan Perikanan Dari Direktur Pemberdayaan Usaha Praktek pengolahan rolade tuna yang dipimpin

oleh Tim BBP3KP satker Ambon dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing.

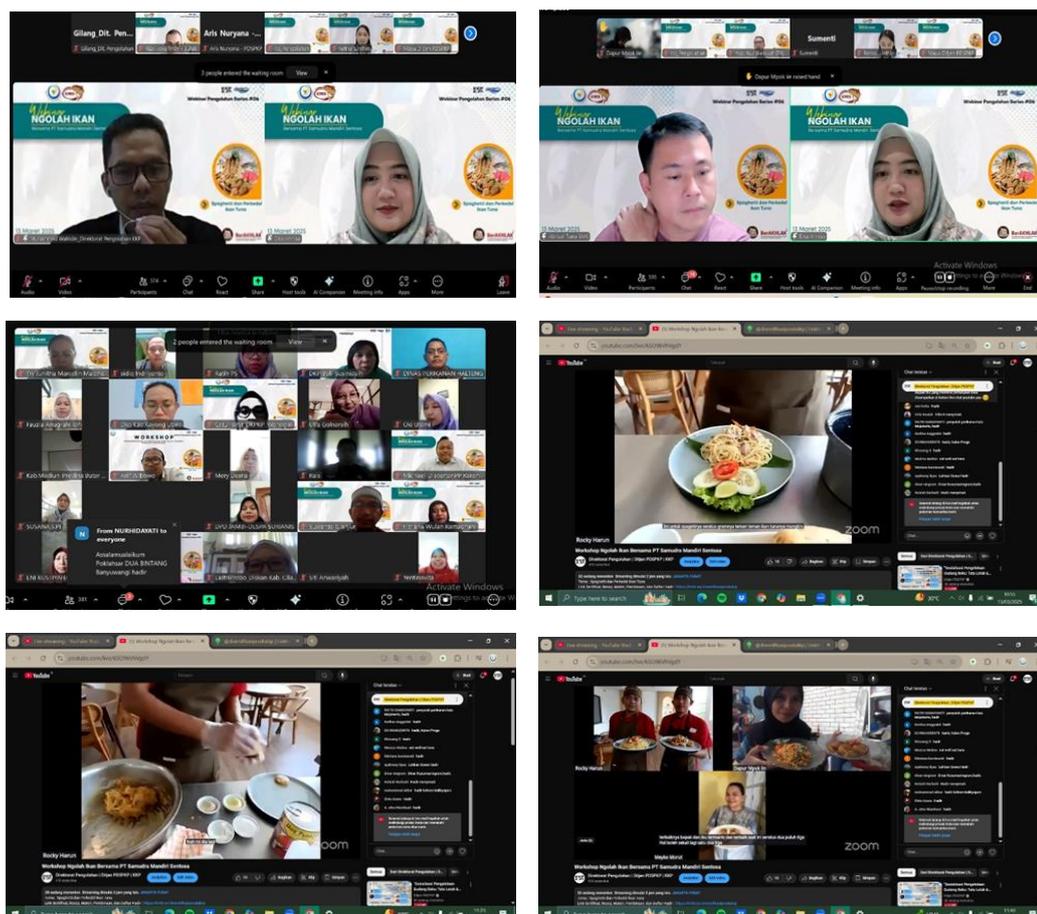


Gambar 28. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan

2. Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa

Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 secara hibrid yaitu offline di Restoran PT. Samudra Mandiri

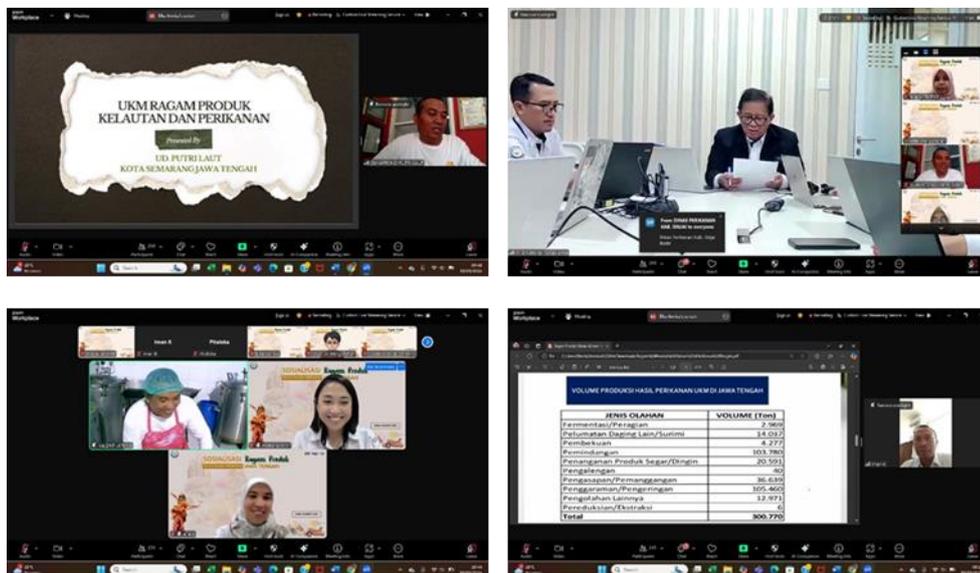
Sentosa Kota Bitung Sulawesi Utara dan online melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 502 peserta melalui zoom meeting dan 175 peserta melalui youtube yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan. Praktek pengolahan perkedel tuna dan spaghetti tuna yang dipimpin oleh Tim PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan Direktorat Pengolahan dan diikuti oleh peserta di kedudukan masing-masing. Pengolahan perkedel tuna dan spaghetti tuna ini merupakan salah satu alternatif pelaku usaha dalam menambah varian produk olahannya dan juga sebagai penambah asupan protein dalam rangka pemenuhan gizi melalui protein ikan menuju generasi Indonesia emas bagi masyarakat.



Gambar 29. Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa

3. Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 secara online melalui Zoom Meeting dan youtube. Kegiatan diikuti oleh 376 peserta melalui *Zoom Meeting* yang terdiri atas Dinas Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan, kelompok pengolah perikanan, dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperkenalkan produk unggulan daerah Jawa Tengah yang merupakan hasil inovasi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat umum maupun kelompok pengolah perikanan. Direktorat Pengolahan akan terus mendorong Pemerintah Daerah dalam memperkenalkan ragam olahan unggulan melalui kegiatan sosialisasi ragam produk olahan.



Gambar 30. Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

4. Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan di UPI Nilai Tambah Pekalongan

Kegiatan Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan dilaksanakan pada rentang waktu Januari - Maret 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan uji komisioning guna memastikan alat-alat pengolahan Hidrolisat Protein Ikan bekerja dengan baik sesuai best practice dan melakukan fortifikasi HPI ke dalam Produk Pangan. Kegiatan dilakukan di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan yang dibangun pada tahun 2024. Kegiatan pengembangan HPI bertujuan juga untuk mendukung

swasembada pangan, ekonomi biru dan pemenuhan gizi melalui protein ikan menuju generasi Indonesia emas. Kegiatan Pengembangan HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan terdiri 2 kegiatan yaitu Uji Komisioning Pengolahan HPI dan Fortifikasi HPI ke dalam Produk Pangan pada UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan (Mie dan kue glundung HPI). Kegiatan Fortifikasi HPI kedalam Produk Pangan pada UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan yang termasuk dalam rangkaian Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan (Mie dan kue glundung HPI). Fortifikasi HPI pada produk pangan (Mie dan kue glundung HPI) memberikan dampak positif terkait pengenalan dan pengembangan HPI, terlihat dari antusias Peserta workshop dalam mengikuti workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah edisi Mie dan kue Glundung HPI.



Gambar 31. Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan di UPI Nilai Tambah Pekalongan

5. Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP

Kegiatan Pilot Test Enzim HPI di BBP3KP dilaksanakan pada rentang waktu Januari - Februari 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan uji coba produksi HPI dengan menggunakan enzim melalui modifikasi perlakuan untuk dapat dilakukan factory trial di UPI NT Kota Pekalongan dan diterapkan secara komersil, serta memenuhi standar SNI 9295:2024 HPI. Hasil uji kadar protein HPI bubuk kontrol, formula F dan G berada di atas kadar minimum yang

dipersyaratkan SNI 9295:2024 dengan besaran yang proporsional jika dibandingkan dengan volume maltodekstrin yang ditambahkan. Kadar protein formula kontrol sebesar 27,15 %, Formula F 40,41 % & 23,03 % serta Formula G 42,03 % & 23,42 %. Hasil uji asam amino HPI bubuk kontrol, formula F dan G juga berada di atas kadar minimum yang dipersyaratkan SNI 9295:2024 yaitu terdiri dari As. Glutamat, Histidin, Isoleusin, Leusin, Lisin, Valin, Fenilalanin dan Treonin. Untuk hasil uji HPI dalam bentuk liquid dalam proses terbit dari laboratorium uji.



Gambar 32. Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja Direktorat Pengolahan sampai dengan waktu pengukuran.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	95	80	80	95	100	89,47	100	10	105	105	-	-

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% sedangkan target triwulan I adalah sebesar 95%. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat (%) pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% atau setara 120% dengan target triwulan I 2025 yakni 95%, dan setara dengan 120% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100%. Capaian pada triwulan I 2025 sama dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2024, yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024, maka ada kenaikan sebesar 10,53 poin atau sebesar 11,77%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I 2025, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari

tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti dibanding jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan		100		100		100			0	0	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada triwulan I 2025 dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2024 dengan tahun 2024 yaitu 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

1. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan		80		81		92,31			0	0	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

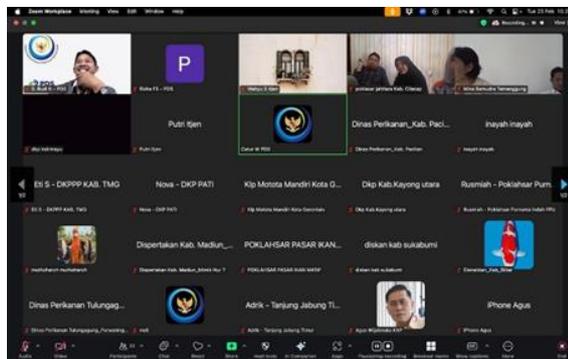
1. Keikutsertaan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja program kegiatan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2024, dilaksanakan pada 16 April 2024 melalui zoom meeting

2. Mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) awal pemanfaatan *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan.



Gambar 33. Monitoring dan evaluasi (monev) awal pemanfaatan *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan

3. Mengadakan kegiatan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 34. Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa.

4. Mengadakan monitoring pemantauan Bantuan Pemerintah Pabrik Es *Portable* (PEP) 2024.

IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan

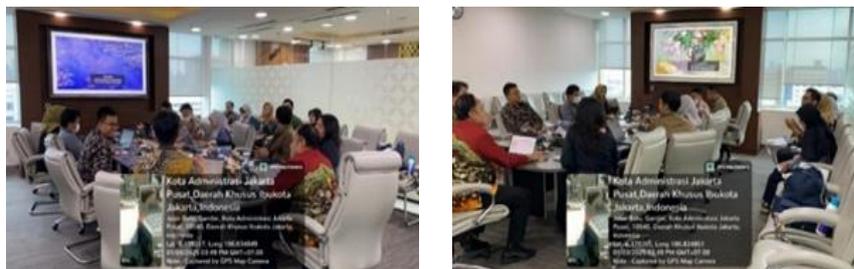
implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW I Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	84	-	86	-	84	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

1. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja Level 1 dan Level 2 tanggal 3 Januari 2025 di RR Karaginan GMB 3'



Gambar 35. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja

2. Penginputan perencanaan kinerja tahun anggaran 2025 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada aplikasi SAPK tanggal 12 Maret 2025 di RR Setditjen PDSPKP GMB 3.



Gambar 36. Peningtutan perencanaan kinerja pada aplikasi SAPK

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Pengolahan sebesar 86, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya peningkatan target tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 2 poin atau meningkat 2,38% dari target tahun 2024.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan tahun 2025 ditargetkan sebesar 87, IK ini bersifat semesteran yang perhitungannya dimulai pada triwulan II. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I 2025	% Realisasi s.d. TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW IV 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	84	-	87	-	88,10	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Januari sampai dengan Maret 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan triwulan I 2025 sebesar 105,09. Adanya peningkatan 2,1 poin atau 2,04% jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 2,18 poin atau 2,12%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan triwulan I diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 25%; capaian 25% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 3%; capaian 8% atau 120,00% dari target.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 10%; capaian 10% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 120,00% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran

(Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan I 2025, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
<p>Produksi Kelautan Perikanan</p> <p>Olahan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan data lalu lintas ikan sebagai dasar penghitungan volume produk olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar menggunakan rentang kendali eksternal diluar Ditjen PDSPKP dan KKP. Karena sumber data berasal dari BBPMHKP dan Badan Karantina Indonesia (BKI), sehingga dibutuhkan perjanjian kerja sama KKP dan BKI. • Perolehan data untuk updating populasi UPI Skala Menengah Besar tahun 2025 yang diperoleh dari K/L lain membutuhkan waktu yang cukup lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sinergitas dan koordinasi berkala dengan BKI dan BBPMHKP untuk perolehan data lalu lintas ikan sebagai sumber data volume produk olahan Tahun 2025. • Review ulang terkait usulan kerangka sampling setelah penerapan efisiensi anggaran.

4.3. Permasalahan

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut
Melaksanakan jajak pendapat untuk RSNi ekstrak ikan gabus sebagai sumber albumin akan dilaksanakan di bulan Januari 2025	Melaksanakan jajak pendapat untuk RSNi ekstrak ikan gabus sebagai sumber albumin

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (<https://drive.google.com/drive/folders/1RBHrpaQy6VmzCV6wvcRqGISOQ50Dexfs>).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

4.4. Lampiran



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan

Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	16.829.050.000
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2025	16.829.050.000

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan



Widya Rusyanto